

**Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* PT Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan**

Arnold Ondang<sup>1,\*</sup>, Novie Revlie Pioh<sup>2</sup>, Fanley N. Pangemanan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

\*Coressponding Author: [arnoldondang@gmail.com](mailto:arnoldondang@gmail.com)

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. Cargill dalam membantu pembangunan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan mendeskripsikan implementasi program CSR PT. Cargill tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: dilihat dari proses komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasinya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari segi sumber daya yang dimiliki oleh PT. Cargill sudah cukup baik, dari sisi komunikasi pihak PT. Cargill selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Dari sisi disposisi yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Sedangkan daeri struktur birokrasi sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR yang dilakukan. Namun memang program CSR yang dilakukan oleh PT. Cargill masih belum merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.

**Kata Kunci: Implementasi; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill**

**ABSTRACT**

*This article examines how the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT. Cargill in assisting development in the West Amurang District, South Minahasa Regency. This study uses a qualitative method, which will describe the implementation of PT. the cargill. The study was carried out using the approach put forward by George C. Edward on several things that can influence the success of an implementation, namely: seen from the communication process, the resources owned, the disposition, and how the bureaucratic structure is. The research findings illustrate that in terms of the resources owned by PT. Cargill has been quite good, in terms of communication from PT. Cargill always maintains good relations with all parties. In terms of the disposition to improve the economy, such as creating jobs for the surrounding community with salaries and benefits according to the UMP of the Provincial Government of North Sulawesi and for natural resources, several improvements to trees and plants are certainly carried out to support the interests of the community and the company. Meanwhile, from the bureaucratic structure so far, according to the research results obtained, it shows that the CSR managers have carried out their duties according to the company's SOPs. However, the CSR program carried out by PT. Cargill is still not evenly distributed for all people in South Minahasa Regency.*

**Keywords: Implementation; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill**

**PENDAHULUAN**

Manusia melakukan kegiatan sosial dan ekonomi untuk keberlangsungan hidupnya. Lingkungan merupakan tempat manusia tinggal, bekerja, beraktivitas, dan bersosialisasi tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan cara bekerja. Banyak perusahaan-perusahaan dibangun di sekitar pemukiman manusia dengan harapan agar manusia di lingkungan perusahaan dapat terlibat sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat serta bermanfaat bagi perusahaan karena perusahaan mendapatkan tenaga kerja. Apabila suatu perusahaan industri membuang limbah perusahaan ke lingkungan maka akan terjadi pencemaran lingkungan hingga terjadi degradasi kualitas maupun kuantitas lahan. Masalah-masalah dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat tersebut akhirnya memunculkan sebuah konsep yang diharapkan dapat memperkecil gesekan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Konsep pertama menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencari *profit*, sehingga CSR merupakan bagian dari operasi bisnis. Sedangkan konsep kedua menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencapai laba (*profit*), mensejahterakan orang (*people*) dan menjamin keberlanjutan hidup dari *planet* (*planet*). Kedua konsep ini sangat berbeda.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas. Dari definisi ini, CSR secara internal merupakan kebijakan, praktek dan program yang terintegrasi dengan aktivitas perusahaan, rantai nilai dalam proses pengambilan keputusan. CSR juga merupakan sebuah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, dimana dengan itu akan meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dari masyarakat luas pada umumnya.

Penerapan CSR di Indonesia saat ini semakin meningkat, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan dan pengelolaannya pun semakin beragam dan juga jika dilihat dari segi finansial, jumlahnya pun semakin besar. Tidak hanya dalam bentuk material, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan saat ini pun banyak pula yang bersifat memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan ketrampilan dan keahlian yang dimilikinya dengan berbagai program CSR yang dilakukan oleh perusahaan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat sekitar yang dianggap masih kurang.

CSR sebagai program yang harus dijalankan perusahaan tidak bersifat sesaat (*short term*), tapi harus berkesinambungan (*long term*). Tidak hanya membagi kedermawanan melainkan berusaha menjaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR pada dasarnya mempunyai tujuan akhir yakni *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang dapat diukur secara kualitatif.

Dalam konteks pembangunan, CSR tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi CSR harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam hal hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan mengatur CSR dalam instrumen hukum, yakni pasal 15 huruf b Undang-undang Pasar Modal dan pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas yang menegaskan CSR sebagai kewajiban bagi perseroan. Wacana tentang tanggung jawab sosial sudah cukup berkembang terutama setelah ditetapkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 tentang keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR.

Pada implementasinya, CSR merupakan bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu implementasi konsep CSR adalah dengan menjalankan program *Community Development* (pengembangan masyarakat). CSR juga sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan dan mampu memberdayakan masyarakat. Kata-kata pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan ini merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman secara bersama-sama.

Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dalam jangka panjang, CSR menjadi suatu keharusan bagi perusahaan. Apalagi sebenarnya perusahaan sendiri pun memperoleh manfaat dari CSR ini, yang terutama yaitu mengenai manajemen reputasi perusahaan. CSR yang awalnya hanya sebagai suatu kegiatan filantropik sudah menjadi suatu strategi perusahaan.

Industri dan masyarakat harus menciptakan suatu bentuk hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak terjadi kasus bahwa keberadaan industri memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Pembuangan limbah industri-industri tersebut ke sungai berdampak pada kehidupan masyarakat. Akibat sungai yang telah tercemari limbah pabrik, maka kualitas air sumur masyarakat menjadi tidak sehat. Hal ini membuat masyarakat sering terkena penyakit kulit bila mandi dengan air yang berasal dari sumur tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya industri semakin menyengsarakan masyarakat. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus, karena akan mengganggu hubungan antara industri dan masyarakat. Padahal, kemampuan industri untuk beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya menjadi salah satu prasyarat eksistensi industri. Sebuah konsep yang akhir-akhir ini sering dibicarakan dalam usaha untuk menciptakan hubungan yang baik antara industri dan masyarakat berupa tanggung jawab sosial atau disebut juga Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering kali disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis, bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal).

Terdapat 4 Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan CSR Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu: 1. Membantu mengurangi biaya hidup masyarakat, 2. Membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen, dan 4. Meningkatkan wawasan, mampu memberi keuntungan bagi masyarakat sekaligus perusahaan. Keuntungan ini bisa memiliki bentuk yang nyata seperti pendapatan.

Manfaat CSR, yaitu: Meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan. Mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab dari masyarakat, investor, sponsor, pemerintah, pelanggan, dan perusahaan lain. Membangun hubungan baik antara berbagai pihak. Adapun beberapa masalah yang ditemui dilapangan Ketika implementasi program CSR PT Cargill yaitu :

1. Rehabilitasi alam yang dilakukan tidak merata pada semua lingkungan masyarakat
2. Bantuan dari PT Cargill ke masyarakat tidak merata
3. Para pekerja pribumi kebanyakan masih bersifat sementara belum tetap
4. Perusahaan masih sering mem PHK karyawan pribumi

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Implementasi

Menurut Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan.
- b. Hubungan antar organisasi.
- c. Sumberdaya.
- d. Karakter institusi implementor.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan". Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan pengadilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu

proses peletakkan dalam praktek tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu Tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Adapun tahap-tahap implementasi menurut Muhammad Joko Susila, yaitu :

1. Pengembangan Program.
2. Pelaksanaan Pembelajaran.
3. Evaluasi.

## **B. Konsep Corporate Social Responsibility**

### **• Pengertian *Corporate Social Responsibility***

Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (*voluntary*). CSR tersebut dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri. Rumusan tentang CSR diantaranya telah diungkapkan oleh *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* yang merumuskan CSR sebagai “*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life*”.

Rumusan WBCSD ini menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR. Dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dilihat dari:

Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Begitu pula ketentuan pasal 74 UUPT yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Program CSR yang dijalankan tidak bersifat jangka pendek (*short term*) dan sekadar membagi-bagi kedermawanan, tetapi bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Monitoring serta evaluasi program sangat dibutuhkan agar kegiatan berlangsung tepat sasaran, bahkan laporan sebagai cerminan *output* dijadikan sebagai umpan balik.

Dari sudut pemerintah, CSR dapat dilihat sebagai bagian dari partisipasi *corporate* dalam sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dari sudut politik, merupakan sarana *corporate* untuk memperoleh dukungan dari pemerintah. Dari kalangan masyarakat, merupakan hak warga sekitar untuk memperoleh manfaat dari kehadiran perusahaan terhadap peningkatan

taraf hidup mereka. Dari sudut pandang perusahaan, CSR merupakan proses internalisasi faktor-faktor eksternal yang merujuk kepada *Triple Bottom Line* (3P) yakni *People, Planet, dan Profit*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

- **Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility**

Sebagai acuan dalam menerapkan CSR dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst. Dimana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu:

- a. **Prioritas Perusahaan.** Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.
- b. **Manajemen Terpadu.** Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
- c. **Proses Perbaikan.** Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
- d. **Pendidikan Karyawan.** Karyawan sebagai stakeholders primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.
- e. **Pengkajian.** Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampaknya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
- f. **Produk dan Jasa.** Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
- g. **Informasi Publik.** Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan/atau jasa.
- h. **Fasilitas dan Operasi.** Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
- i. **Penelitian.** Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.
- j. **Prinsip Pencegahan.** Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- k. **Kontraktor dan Pemasok.** Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
- l. **Siaga Menghadapi Darurat.** Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan

harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal.

- m. *Transfer Best Practice*. Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- n. Memberikan Sumbangan. Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
- o. Keterbukaan (*disclosure*). Menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.
- p. Pencapaian dan Pelaporan. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.

- **Implementasi Corporate Social Responsibility**

Dalam Implementasinya, ada empat model atau pola tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan.

Mengenai tujuh prinsip tanggungjawab social sebagai standar penerapan tanggungjawab social, maka implementasi menanam pohon berlandaskan kepada prinsip :

- a. Akuntabilitas, terkait tanggung jawab perusahaan terhadap efek yang ditimbulkan CSR pada lingkungan dan masyarakat serta menjadi akuntabel terhadap efek tersebut.
- b. Transparansi, terkait pengorganisasi tanggung jawab social perusahaan harus transparan dalam pengambilan keputusan serta aktivitas terkait komunitas dan lingkungan. Organisasi harus mengkomunikasikan peraturan, keputusan, serta aktivitasnya.
- c. Perilaku etis, terkait sikap yang harus dimiliki dalam aktivitas perusahaan dalam tanggungjawab social perusahaan, yaitu kejujuran, kesamaan dan integritas.

- d. Respek terhadap kebutuhan stakeholder, terkait bagaimana organisasi menghargai, mempertimbangkan dan merespon kepentingan setiap stakeholder yang ada dalam aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan.
- e. Respek terhadap peraturan hukum; terkait bahwa setiap tanggung jawab sosial perusahaan harus mengikuti hukum yang berlaku sebagai dasar dari kegiatan bisnis dalam alur tanggung jawab sosial.
- f. Respek terhadap norma perilaku internasional; terkait kegiatan CSR yang dilakukan tidak boleh melewati norma yang ada di dunia Internasional.
- g. Respek terhadap HAM; terkait kegiatan CSR, maka harus menghargai HAM serta mengakui dan menyadari pentingnya HAM.

Memahami begitu luasnya cakupan ruang lingkup CSR, masing-masing perusahaan mempunyai karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi ini akan berdampak pada implementasi CSR yang berbeda pula. Namun secara komprehensif dapat dikelompokkan atas enam bidang, yaitu:

- a. Bidang Ekonomi. Dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal.
- b. Bidang Politik. Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu mereka mempunyai kewajiban di bidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik di masyarakat.
- c. Bidang Sosial. Perusahaan mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang.
- d. Bidang Legal. Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab sosial seseorang tetapi merupakan keharusan mutlak. Dengan ketaatan itu tertib sosial dapat terpelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dapat diwujudkan.
- e. Bidang Etika. Norma moral dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat. Dan kondisi ini pun berlaku dalam dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota dari suatu komunitas yang dalam artifisial sama dengan manusia sendiri.
- f. Diskresi (kebebasan mengambil keputusan). Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban sosial yang akan ditunaikannya.

### **C. Konsep Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang – barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat (Sudharto P. Hadi, 2000).

Adapun menurut (Supardi. I, 1994) pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi

dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peningkatan pembangunan, pemeliharaan kestabilan ekonomi, sosial dan ekologi harus berjalan serasi dan bersama-sama. Artinya bahwa pembangunan hendaknya bersifat terpadu antara segi ekonomi, sosial dan ekologi dengan tujuan menggunakan ekologi dalam perencanaan pembangunan yang meliputi peningkatan mutu pencapaian pembangunan dan meramalkan sebelumnya pengaruh aktivitas pembangunan pada sumber daya dan proses-proses alam lingkungan yang lebih luas.

Adapun pembangunan menurut (Tjahja, S, 2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat dititik beratkan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan:

1. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
3. Pembangunan yang di orientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Pengertian Pembangunan menurut Rogers dalam Nasution (2007) adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun Tujuan Pembangunan menurut Nasution (2007) terbagi atas 2 bagian :

1. Tujuan Umum Pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Dalam relevansinya dengan Pembangunan Nasional Dimensi Pembangunan Nasional menurut Swasono, (2005: 22) adalah merupakan suatu Proses dari demokrasi baik secara politik political democratization, social maupun ekonomi economic democratization untuk mencapai kemajuan progress, kebebasan freedom serta mengurangi hambatan elimination of freedom, di mana proses ini juga merupakan proses dari humanisasi. Di samping itu menumbuhkan pendapatan nasional growth melalui penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi bahkan menghapus pengangguran dan kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. (Moleong, 2018) Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program *corporate social responsibility* PT Cargill dalam Pembangunan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan teori dari George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,

dan Struktur Birokrasi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data (*data reduction*), kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyajian data (*data display*), dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait pembangunan PT Cargill Indonesia Amurang dalam membangun daerah khususnya di bidang kondisi lingkungan, terkait hal ini pihak perusahaan telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melakukan pembangunan serta menjaga kondisi lingkungan sekitar, seperti halnya pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang berada di tapak kegiatan semula terdiri 6 bak penampungan yang berfungsi menampung dan menyaring kotoran yang terdapat dalam air limbah tersebut sebelum mengalir menuju laut. Dalam menjaga kondisi lingkungan dapat dilihat juga upaya pemeriksaan harian TP limbah B3 setiap hari oleh petugas lingkungan dengan menggunakan daftar periksa dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada plant manager. Adapun tujuan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada tumpahan atau kebocoran dari kemasan limbah B3 dll. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pihak PT Cargill dalam hal pembangunan kondisi lingkungan sekitar perusahaan sudah melakukan berbagai upaya yang ada menjaga lingkungan sekitar.

Pembangunan kondisi lingkungan juga, dapat dilihat dari bantuan lingkungan di bidang pertanian, dimana salah satu pencaharian masyarakat adalah petani, jadi pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin dalam hal pembangunan pertanian, pihak perusahaan menjaga harga kopra dan membeli kopra dari masyarakat sekitar agar supaya hal ini dapat membantu masyarakat untuk hal pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dari diberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar berupa untuk operasional pabrik dilaksanakan dengan mengutamakan tenaga kerja dari daerah setempat, dari Kabupaten Minahasa Selatan, kabupaten lainnya di Sulawesi Utara dan juga dari Manado. Kami juga memberikan insentif kepada karyawan untuk memacu produktivitas kerja karyawan, pihak perusahaan memberikan gaji dan upah di atas tingkat upah minimum Provinsi. Gaji dan upah bagi karyawan selalu ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) kali setahun melalui proses evaluasi PMP. Pemberian bonus tahunan setiap akhir tahun fiskal juga dilakukan secara berkala pada semua karyawan. THR pada saat hari raya natal/idul fitri juga diberikan kepada semua karyawan setiap tahunnya. Pihak kami juga menjalin Kerjasama dengan pemerintah setempat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Diantaranya pemeriksaan boiler, pemeriksaan alat berat dan alat pemadam kebakaran secara berkala. Beberapa kunjungan pemerintah ke PT Cargill Indonesia Amurang seperti melakukan verifikasi lapangan untuk penataan ijin pembuangan air limbah ke laut. Kita juga melakukan Kerjasama dengan Kelurahan dan Kepolisian dalam hal sosialisasi kebakaran lahan dan edukasi bahaya pembukaan lahan dengan cara di bakar berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 pasal 108 tentang perkebunan, serta merancang dan memperkenalkan program agrowisata di bukit sasayaban Bersama dengan pemerintah Kabupaten untuk membantu pemanfaatan lahan kosong menjadi lokasi agrowisata.

### 2. Sumber Daya

Dalam hal ini peneliti akan membahas terkait hubungan antar organisasi, yang meliputi hubungan dari PT Cargill, Pemerintah, Polres dan juga semua elemen masyarakat yang ada. Sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh bahwa pihak PT Cargill selalu menjaga hubungan dengan semua pihak yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan, misalnya hubungan dengan pemerintah Kecamatan Amurang Barat terkait kesejahteraan masyarakat. Pendidikan bahkan

pertanian. Hubungan ini dibuktikan dengan koordinasi yang melibatkan pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan yang ada. Kemudian hubungan dengan Polres Minahasa Selatan, pihak perusahaan menjalin hubungan untuk dapat membangun zebra cross yang nantinya akan mempermudah akses pekerja atau masyarakat sekitar karena mengingat lokasi perusahaan di depannya merupakan jalan trans, yang tentunya banyak kendaraan yang lewat di tempat tersebut.

Pihak kami juga menjalin Kerjasama dengan pemerintah setempat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Diantaranya pemeriksaan boiler, pemeriksaan alat berat dan alat pemadam kebakaran secara berkala. Beberapa kunjungan pemerintah ke PT Cargill Indonesia Amurang seperti melakukan verifikasi lapangan untuk penataan ijin pembuangan air limbah ke laut. Kita juga melakukan Kerjasama dengan Kelurahan dan Kepolisian dalam hal sosialisasi kebakaran lahan dan edukasi bahaya pembukaan lahan dengan cara di bakar berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 pasal 108 tentang perkebunan, serta merancang dan memperkenalkan program agrowisata di bukit sasayaban Bersama dengan pemerintah Kabupaten untuk membantu pemanfaatan lahan kosong menjadi lokasi agrowisata.

Pembangunan kondisi lingkungan juga, dapat dilihat dari bantuan lingkungan di bidang pertanian, dimana salah satu pencaharian masyarakat adalah petani, jadi pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin dalam hal pembangunan pertanian, pihak perusahaan menjaga harga kopra dan membeli kopra dari masyarakat sekitar agar supaya hal ini dapat membantu masyarakat untuk hal pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dari diberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar berupa untuk operasional pabrik dilaksanakan dengan mengutamakan tenaga kerja dari daerah setempat, dari Kabupaten Minahasa Selatan, kabupaten lainnya di Sulawesi Utara dan juga dari Manado. Kami juga memberikan insentif kepada karyawan untuk memacu produktivitas kerja karyawan, pihak perusahaan memberikan gaji dan upah di atas tingkat upah minimum Provinsi. Gaji dan upah bagi karyawan selalu ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) kali setahun melalui proses evaluasi PMP. Pemberian bonus tahunan setiap akhir tahun fiskal juga dilakukan secara berkala pada semua karyawan. THR pada saat hari raya natal/idul fitri juga diberikan kepada semua karyawan setiap tahunnya. Pihak kami juga menjalin Kerjasama dengan pemerintah setempat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Diantaranya pemeriksaan boiler, pemeriksaan alat berat dan alat pemadam kebakaran secara berkala. Beberapa kunjungan pemerintah ke PT Cargill Indonesia Amurang seperti melakukan verifikasi lapangan untuk penataan ijin pembuangan air limbah ke laut.

### **3. Disposisi**

Pada indikator ini penulis akan membahas terkait sumber daya apa saja yang di bangun oleh Pihak PT Cargill. Dalam hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang dilakukan peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Untuk pembangunan di bidang sumber daya manusia tentunya sangat dibutuhkan karena ini bicara soal peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar terutama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Pada pembangunan sumber daya alam tentunya sangat bermanfaat hal ini tentunya untuk menjaga kestabilan alam untuk kepentingan Bersama, baik masyarakat juga kehidupan yang berlangsung pada kehidupan PT Cargill.

Pembangunan kondisi lingkungan juga, dapat dilihat dari bantuan lingkungan di bidang pertanian, dimana salah satu pencaharian masyarakat adalah petani, jadi pihak perusahaan berusaha semaksimal mungkin dalam hal pembangunan pertanian, pihak perusahaan menjaga harga kopra dan membeli kopra dari masyarakat sekitar agar supaya hal ini dapat membantu masyarakat untuk hal pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dari diberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar berupa untuk operasional pabrik dilaksanakan dengan mengutamakan tenaga kerja dari daerah setempat, dari Kabupaten Minahasa Selatan, kabupaten lainnya di Sulawesi Utara dan juga dari Manado. Kami juga memberikan insentif kepada karyawan untuk memacu produktivitas kerja karyawan, pihak perusahaan memberikan gaji dan upah di atas tingkat upah minimum Provinsi. Gaji dan upah bagi karyawan selalu ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) kali setahun melalui proses evaluasi PMP. Pemberian bonus tahunan setiap akhir tahun fiskal juga dilakukan secara berkala pada semua karyawan. THR pada saat hari raya natal/idul fitri juga diberikan kepada semua karyawan setiap tahunnya. Pihak kami juga menjalin Kerjasama dengan pemerintah setempat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Diantaranya pemeriksaan boiler, pemeriksaan alat berat dan alat pemadam kebakaran secara berkala. Beberapa kunjungan pemerintah ke PT Cargill Indonesia Amurang seperti melakukan verifikasi lapangan untuk penataan ijin pembuangan air limbah ke laut. Kita juga melakukan Kerjasama dengan Kelurahan dan Kepolisian dalam hal sosialisasi kebakaran lahan dan edukasi bahaya pembukaan lahan dengan cara di bakar berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 pasal 108 tentang perkebunan, serta merancang dan memperkenalkan program agrowisata di bukit sasayaban Bersama dengan pemerintah Kabupaten untuk membantu pemanfaatan lahan kosong menjadi lokasi agrowisata.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Pada indikator ini penulis akan membahas terkait karakter institusi implementor dalam hal ini Manager CSR PT Cargill dalam melaksanakan program dibidangnya. Sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini juga tentunya ini merupakan suatu pencapaian yang baik bagi pihak manajemen perusahaan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa pihak perusahaan dapat menjangkau masyarakat dengan tujuan untuk dapat membantu masyarakat tersebut.

Dalam proses penerapan program CSR ini tentunya membutuhkan Kerjasama dari berbagai pihak seperti pihak keamanan, pemerintah setempat bahkan masyarakat, karena untuk dapat menjalankan program-program dari CSR butuh Kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari diberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar berupa untuk operasional pabrik dilaksanakan dengan mengutamakan tenaga kerja dari daerah setempat, dari Kabupaten Minahasa Selatan, kabupaten lainnya di Sulawesi Utara dan juga dari Manado. Kami juga memberikan insentif kepada karyawan untuk memacu produktivitas kerja karyawan, pihak perusahaan memberikan gaji dan upah di atas tingkat upah minimum Provinsi. Gaji dan upah bagi karyawan selalu ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) kali setahun melalui proses evaluasi PMP. Pemberian bonus tahunan setiap akhir tahun fiskal juga dilakukan secara berkala pada semua karyawan. THR pada saat hari raya natal/idul fitri juga diberikan kepada semua karyawan setiap tahunnya. Pihak kami juga menjalin Kerjasama dengan pemerintah setempat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Diantaranya pemeriksaan boiler, pemeriksaan alat berat dan alat pemadam kebakaran secara berkala. Beberapa kunjungan pemerintah ke PT Cargill Indonesia Amurang seperti melakukan verifikasi lapangan untuk penataan ijin pembuangan air limbah ke laut.

#### **KESIMPULAN**

Sumberdaya pembangunan PT Cargill Indonesia Amurang dalam membangun daerah khususnya di bidang kondisi lingkungan, terkait hal ini pihak perusahaan telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melakukan pembangunan serta menjaga kondisi lingkungan

sekitar, seperti halnya pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang berada di tapak kegiatan semula terdiri 6 bak penampungan yang berfungsi menampung dan menyaring kotoran yang terdapat dalam air limbah tersebut sebelum mengalir menuju laut. Dalam menjaga kondisi lingkungan dapat dilihat juga upaya pemeriksaan harian TP limbah b3 setiap hari oleh petugas lingkungan dengan menggunakan daftar periksa dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada plant manager.

Komunikasi pihak PT Cargill selalu menjaga hubungan dengan semua pihak yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan, misalnya hubungan dengan pemerintah Kecamatan Amurang Barat terkait kesejahteraan masyarakat. Pendidikan bahkan pertanian. Hubungan ini dibuktikan dengan koordinasi yang melibatkan pemerintah untuk dapat melakukan pembangunan yang ada. Kemudian hubungan dengan Polres Minahasa Selatan, pihak perusahaan menjalin hubungan untuk dapat membangun zebra cross yang nantinya akan mempermudah akses pekerja atau masyarakat sekitar karena mengingat lokasi perusahaan di depannya merupakan jalan trans, yang tentunya banyak kendaraan yang lewat di tempat tersebut.

Disposisi yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Untuk pembangunan di bidang sumber daya manusia tentunya sangat dibutuhkan karena ini bicara soal peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar terutama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan.

Struktur birokrasi sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini juga tentunya ini merupakan suatu pencapaian yang baik bagi pihak manajemen perusahaan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa pihak perusahaan dapat menjangkau masyarakat dengan tujuan untuk dapat membantu masyarakat tersebut

Disarankan untuk Pihak PT Cargill khususnya dalam membantu pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Kecamatan Amurang Barat dalam hal pembangunan pada lingkungan harus lebih teliti lagi, apalagi soal pengelolaan limbah yang di buang, karena mengingat jangan sampai tercemar pada lingkungan masyarakat, karena setiap ada pembangunan pabrik tentunya permasalahan yang sering timbul soal limbah yang harus di perhatikan. Disarankan juga untuk hubungan antar organisasi yang di bangun oleh Pihak PT Cargill terus di jaga, dan diharapkan agar supaya melibatkan semua unsur dan lapisan masyarakat.

Disarankan juga untuk pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia bahkan sumber daya alam dalam hal peningkatan pembangunan harus dilakukan secara merata, karena mengingat belum semua masyarakat yang merasakan lapangan pekerjaan, bantuan atau dapat di katakana belum merata. Diharapkan juga untuk pelaksana program CSR dalam setiap pengambilan keputusan bahkan pelaksanaan program lebih mengutamakan kepentingan Bersama jangan hanya kepentingan pribadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Arsyad, Lincoln. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

- Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Laili, Nur. 2007. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY 1990-2004. Skripsi, tidak dipublikasikan. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII.
- Mardiana, Aji. 2006. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1984-2003. Skripsi, tidak dipublikasikan. Yogyakarta : FE UUI.
- Moleong, Lexy J. 2018. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, 2012. Nasdian, Ferdian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2002. Prijono, bandingkan Onny S dan A.M. W. Pranarka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre For Strategic an International Studies (CSIS), 1996.
- Radyati, Maria Nindita. *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Busniness Links, 2008.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003 . *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. Jakarta: Erlangga.